

# **IMPLEMENTASI PROGRAM RELOKASI PASAR TANGGA ARUNG PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Anita Intan N<sup>1</sup> Aji Ratna Kusumua<sup>2</sup>, Santi Rande<sup>3</sup> <sup>1</sup>**

## *Abstrak*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam implementasi kebijakan program relokasi Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pemindahana Pasar Tangga Arung ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang merupakan program pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam instruksi langsung dari Bupati Kutai Kartanegara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32/SK-BUP/HK/2017 Tentang Tim Pemindahan Pedagang Dari Pasar Tangga Arung Ke Pasar Mangkurawang Kecamatan Tenggarong.

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan implementasi program relokasi pasar. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tangga Arung dan Pasar Mangkurawang Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis model interaktif dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah Kasi Pengembangan dan Penataan Pasar dan Kasi Pengembangan dan Pendapatan Pasar .

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa dalam pelaksanaan relokasi sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sumber daya manusia, finansial dan waktu telah memenuhi, serta karakteristik agen pelaksana melibatkan organisasi formal dan sudah tepat, dalam sikap para pelaksana terhadap program relokasi tanpa ada penolakan untuk keberlangsungan jalannya program, sudah terjalinnya komunikasi yang efektif antar antarorganisasi dan aktivitas pelaksana namun tidak untuk pedagang, serta lingkungan ekonomi bagi pedagang tidak tercapainya peningkatan ekonomi melainkan penurunan sumber ekonomi bagi para pedagang yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar, untuk lingkungan sosial bagi pedagang dan pembeli mempunyai kesamaan dalam keresahan akan lokasi pasar yang jauh dan dalam lingkungan politik ada beberapa lembaga swadaya masyarakat serta forum pedagang yang tidak setuju

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

akan program relokasi ini namun permasalahan politik ini dapat diatasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

***Kata Kunci : Implementasi, Relokasi Pasar***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pasar, Pemerintah Kota Tenggarong menerapkan kebijakan berupa revitalisasi. Salah satu bentuk kebijakan revitalisasi pasar adalah relokasi yaitu pemindahan lokasi pasar dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Tenggarong, pada tahun 2015 Pasar Tangga Arung mengalami kebakaran dan menghancurkan beberapa kios serta kantor pengelolaan Pasar Tangga Arung tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut maka pada tahun 2017 dilakukan pemindahan lokasi (relokasi) pada eks kebakaran Pasar Tangga Arung dalam rangka menata ruang di sekitar Pasar Tangga Arung Kota Tenggarong. Pasar Tangga Arung merupakan salah satu *icon* pasar tradisional yang berada di Kota Tenggarong. Pemerintah Kota Tenggarong memiliki rencana untuk menata kawasan Kota Tenggarong maka akan dilakukan relokasi pada Pasar Tangga Arung yang dimana kawasan pasar ini akan dijadikan sebagai lahan terbuka hijau atau taman kota.

Kegiatan relokasi Pasar Tangga Arung ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang sudah terjadi sejak tahun 2013 akan tetapi relokasi ini melalui proses yang cukup panjang, pasalnya lokasi pasar yang baru jauh dari pusat kota dan para pedagang maupun pembeli merasa pemindahan pasar tersebut tidak efektif dikarenakan lokasi pasar baru yang jauh hingga proses pengundian penempatan kios-kios bagi pedagang eks kebakaran Pasar Tangga Arung yang akan di relokasi diwarnai berbagai macam sengketa. Namun relokasi ini memiliki tujuan diantaranya agar pasar Tangga Arung tidak ditinggalkan para konsumen karena penataan lokasi yang kurang optimal serta diharapkan dengan pemindahan lokasi pasar ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tampung pedagang serta pembeli. Peningkatan daya tampung tersebut diharapkan dapat membantu pedagang Pasar Tangga Arung agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Pemindahan Pasar Tangga Arung ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang merupakan program pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam instruksi langsung dari Bupati Kutai Kartanegara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32/SK-BUP/HK/2017 Tentang Tim Pemindahan Pedagang Dari Pasar Tangga Arung Ke Pasar Mangkurawang Kecamatan Tenggarong. Pasar Mangkurawang diresmikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara yaitu Rita Widyasari pada tanggal 30 November 2013, saat peresmian Bupati Kukar sekaligus melakukan

peninjauan dan berdialog kepada para pedagang mengenai pendapatan saat pindah ke pasar yang baru ini di banding saat masih berjualan di Pasar Tangga Arung dan mendapati jawaban dari para pedagang bahwa rata-rata pedagang sayur dan ikan mengalami penurunan pendapat sehingga penghasilan menurun drastis hingga 70%. (Sumber: kutaikartanegara.com).

### **Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan (Budiardjo, 2009:20). Menurut Nugroho (2012:123) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan untuk merealisasikan tujuan dari negara dan kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masa transisi, untuk menuju, masyarakat yang dicita-citakan.

### **Tahap-Tahap Kebijakan**

Charles Lindblom (1986, dalam Winarno 2011:35) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap, yaitu:1)Tahap Penyusunan Agenda, 2)Tahap Formulasi Kebijakan, 3) Tahap Implementasi Kebijakan dan 4)Tahap Evaluasi Kebijakan

### **Implementasi Kebijakan**

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134-135) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerinah.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud

dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep-konsep yang berbeda, walaupun tidak berarti bahwa konsep-konsep ini tidak saling berhubungan satu sama lain.

### **Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn**

Menurut Agustino (2006:142-144), ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut yaitu: 1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang krusial. 2. Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu. 3. Karakteristik Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat cocok dengan para agen pelaksanaanya. 4. Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik. Perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan

sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

### **Pengertian Relokasi**

Menurut Ridlo (2001:95) Relokasi atau *resettlement* merupakan proses pemindahan penduduk dari lokasi pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota. Menurut Musthofa (2011:17) Lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar.

Dengan demikian, relokasi dapat diartikan dengan perpindahan, pemindahan atau penataan ulang sebuah lokasi yang sudah tidak layak, baik suatu industri ataupun tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih layak dan sesuai dengan rencana pembangunan kota dengan alasan-alasan tertentu.

### **Pasar Tradisional**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 Ayat 6, menyebutkan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar. Pasar tradisional mempunyai ruang tersendiri di hati para konsumennya dengan keramah tamahan yang khas yang otentik tanpa dibuat-buat. (Indriari dan Arif, 2008:16).

Dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat yang dikelola oleh pedagang kecil yang berupa toko, kios dan los yang dimana transaksi antara pedagang dan pembeli secara langsung dan adanya tawar menawar dalam proses transaksi tersebut serta barang-barang yang di perjualkan sebagian besar merupakan barang-barang kebutuhan pokok.

### **Definisi Konseptual**

Dari teori dan konsep tersebut maka penulis memberikan rumusan sesuai dengan judul penelitian ini Implementasi Kebijakan Program Relokasi Pasar Tangga Arung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis mendefinisikan bahwa sebuah kebijakan merupakan suatu proses pengumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang

tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Satori dan Komariah (2010:4) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Satori dan Komariah 2010:81).

Sugiyono (2014:15) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain

### **Fokus Penelitian**

Penulis menggunakan fokus penelitian untuk membatasi dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh dilapangan sehingga mendukung penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program Relokasi Pasar Tangga Arung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
  - a. Ukuran dan tujuan kebijakan
  - b. Sumberdaya
  - c. Karakteristik agen pelaksana
  - d. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
  - e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
  - f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Relokasi Pasar Tangga Arung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang diambil, maka penulis melakukan penelitian di Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Sumber dan Jenis Data**

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu

penjelasan darimana asal sumber tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Moleong (2004:103) mengemukakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi latar penelitian walaupun bersifat informal, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang diperoleh. Maka dalam penelitian ini yang menjadi *key informant* yaitu Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengembangan dan Pendapatan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan para pedagang. Dalam penelitian ini, untuk memilih dan menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, buku-buku ilmiah, dokumen, foto, arsip, surat-surat atau data lainnya yang diperlukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini, referensi berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
2. Studi Lapangan (*Field Work Research*)  
Studi lapangan atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung di lapangan terhadap objek penelitian. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara: (1) Observasi. (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:15-20) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari atas empat komponen antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data. Data pertama dan masih bersifat mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta data sekunder lainnya yang berhasil diperoleh.
2. Reduksi Data. Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah keempat meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam menguji data dengan cara mencatat, keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi Program Relokasi Pasar Tangga Arung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**

##### **1) Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:142-144), kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa ukuran dasar dan tujuan implementasi program relokasi Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu terpenuhinya tempat untuk para pedagang yang belum mendapatkan petak dan merupakan program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan kota yang mengarah pada pemerataan ekonomi masyarakat pinggiran kota dan mempunyai ukuran berhasil dalam pemindahan pedagang, tingkat ekonomi masyarakat meningkat dan perputaran ekonomi berjalan stabil telah berhasil sudah terealisasi dan dikatakan berhasil dalam pemindahan pedagang yang berhasil dan sudah mendapatkan petak serta pengembangan kota yang mengarah pada pemerataan ekonomi masyarakat pinggiran kota sudah berhasil pula karena lokasi pasar yang baru yaitu Pasar Mangkurawang berada di pinggiran kota yang berarti tidak merusak tatanan kota dan ruang terbuka hijau tetapi lokasi yang masih bisa di akses dengan kendaraan pribadi namun dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat pinggiran kota belum

berhasil dikarenakan keadaan Pasar Mangkurawang yang sepi akan kembali sehingga tidak adanya peningkatan ekonomi.

2) **Sumberdaya**

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:142-144). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa sumberdaya dalam program relokasi Pasar Tangga Arung sudah memenuhi yang dimana sumberdaya manusia dalam proses relokasi Pasar Tangga Arung sudah memenuhi karena dalam perumusan hingga pelaksanaan program relokasi melibatkan beberapa OPD yang memang berkaitan dengan keberhasilan berjalannya program relokasi Pasar Tangga Arung, terlibatnya beberapa OPD dalam perumusan program relokasi ini menggambarkan bahwa kualitas dalam sumberdaya manusia sudah cukup profesional serta kuantitas dalam program relokasi Pasar Tangga Arung sudah cukup jumlahnya untuk melingkupi kelompok sasaran, walaupun dalam sumberdaya finansial terdapat kendala yang dimana dana yang dibutuhkan untuk pemindahan pedagang belum lunas terbayarkan dan sumberdaya waktu yang telah memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam sumberdaya fasilitas sudah terpenuhinya tempat untuk 234 pedagang dengan dibangunkannya pasar tambahan yang berada di depan Pasar Mangkurawang dan sarana serta prasarana pasar yang sangat memadai.

3) **Karakteristik Agen Pelaksana**

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:142-144) pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam karakteristik agen pelaksana program relokasi Pasar Tangga Arung melibatkan organisasi formal yaitu beberapa organisasi pemerintah dalam perumusan kebijakan dan dalam pelaksanaan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan adanya tim pemindahan pasar yang sudah tepat dalam cakupan implementasi kebijakan relokasi Pasar Tangga Arung.

4) **Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:142-144) menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implemmtasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan sikap/kecenderungan (*disposition*) dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor untuk respon, kondisi dan intensitas disposisi implementor sudah berjalan sesuai yang dimana para

pelaksana sepenuhnya memahami ukuran dan tujuan kebijakan program sehingga seluruh agen pelaksana menyetujui berjalannya program dan dalam program relokasi ini para agen pelaksana sudah berkomitmen dan jujur dalam pelaksanaan program yang dapat dilihat dari pemahaman ukuran dan tujuan oleh agen pelaksana serta setujunya dan berjalannya program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

**5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana**

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:142-144) menjelaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, ketepatan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana sudah berjalan baik dan intens karena rumusan dari ukuran dan tujuan-tujuan dari program telah di komunikasikan dengan baik oleh pembuat kebijakan kepada agen pelaksana sehingga apa yang menjadi ukuran dan tujuan program dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dirumuskan. Komunikasi yang intens antar pembuat kebijakan dan agen pelaksana merupakan komunikasi internal yang berhasil. Namun dalam penelitian ini terdapat komunikasi eksternal yang belum berhasil, dimana komunikasi antar agen pelaksana kepada pedagang belum berjalan intens untuk seluruh pedagang. Menurut hasil penelitian ada beberapa pedagang yang menyatakan bahwa agen pelaksana jarang bahkan tidak pernah melakukan komunikasi kepada pedagang terutama untuk pedagang kecil.

**6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik**

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:142-144) guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam program relokasi Pasar Tangga Arung yaitu keresahan pedagang dan pembeli karena lokasi Pasar Mangkurawang yang jauh dari pusat kota sehingga minat belanja ke Pasar Mangkurawang bagi pembeli yang bertempat tinggal di pusat kota berkurang yang berdampak kepada menurunnya sumber pendapatan pedagang sebanyak 2,5%, dan pengaruh lain dari proses relokasi Pasar Tangga Arung ini yaitu timbulnya masalah politik dengan tidak setujunya beberapa lembaga swadaya masyarakat dan forum pedagang akan kebijakan relokasi ini namun permasalahan politik ini

dapat diatasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### **Faktor Penghambat Implementasi Program Relokasi Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama proses implementasi program relokasi Pasar Tangga Arung ada dua faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yaitu:

1. Dana yang digunakan dalam proses implementasi yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masih menjadi utang dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang masih belum terbayarkan.
2. Jumlah los maupun petak dengan jumlah pedagang tidak seimbang sehingga ada sebanyak 234 pedagang yang tidak tertampung di Pasar Mangkurawang, maka di buatnya petak sementara untuk menampung 234 yang berada di seberang Pasar Mangkurawang.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Relokasi Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada bab ini dapat diambil secara garis besar sebagai berikut :

1. Secara garis besar dalam implementasi program relokasi Pasar Tangga Arung sudah berhasil dan berjalan sesuai dengan ukuran dan tujuan dari implementasi program tersebut dalam kegiatan atau program relokasi telah terkoordinasi dan di komunikasikan dengan tepat serta intens antar pembuat kebijakan dan agen pelaksana. Namun bagi pedagang relokasi ini menyebabkan penurunan sumber pendapatan yang disebabkan sepi pembeli dikarenakan lokasi pasar yang baru jauh dari pusat kota. Kesimpulan tersebut diambil dari beberapa hasil wawancara yaitu sebagai berikut:
  - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan implementasi program relokasi Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dalam pemindahan pedagang sudah dikatakan berhasil serta pengembangan kota yang mengarah pada pemerataan ekonomi masyarakat pinggiran kota sudah berhasil, dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat pinggiran kota belum berhasil dikarenakan keadaan Pasar Mangkurawang yang sepi sehingga tidak adanya peningkatan ekonomi khususnya bagi pedagang.
  - b. Sumber Daya melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kuantitas dan kualitas yang cukup memadai dan waktu serta sumberdaya fasilitas telah memadai bagi keberhasilan program meski dalam sumberdaya finansial terdapat kendala yang dimana dana

- yang dibutuhkan untuk pemindahan pedagang belum lunas terbayarkan akan tetapi program relokasi sudah berhasil dilaksanakan dan sudah mencapai tujuannya dan sumberdaya waktu yang telah memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana program relokasi Pasar Tangga Arung melibatkan organisasi formal yaitu beberapa organisasi pemerintah dalam perumusan sampai pelaksanaan kebijakan dan dalam pelaksanaan dilapangan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tertuang dalam tim pemindahan pedagang dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah tepat dalam cakupan implementasi kebijakan relokasi Pasar Tangga Arung.
  - d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana Sikap agen pelaksana yang respons, paham, intensitas disposisi implementor, berkomitmen dan jujur dalam program relokasi Pasar Tangga Arung ini membuat ukuran dan tujuan kebijakan relokasi dapat dicapai dan berhasil.
  - e. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana sudah berjalan baik dan intens karena rumusan dari ukuran dan tujuan-tujuan dari program telah di komunikasikan dengan baik oleh pembuat kebijakan kepada agen pelaksana sehingga apa yang menjadi ukuran dan tujuan program dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dirumuskan.
  - f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik keresahan pedagang dan pembeli karena lokasi Pasar Mangkurawang yang jauh dari pusat kota merupakan permasalahan sosial sehingga minat belanja ke Pasar Mangkurawang bagi pembeli berkurang yang berdampak pada menurunnya sumber pendapatan sebanyak 2,5%, sehingga timbulnya permasalahan politik dengan tidak setujunya beberapa lembaga swadaya masyarakat dan forum pedagang akan kebijakan relokasi ini namun permasalahan politik ini dapat diatasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Faktor Penghambat implementasi program relokasi Pasar Tangga Arung Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
    - a. Dana yang digunakan dalam proses implementasi yang dibebankan kepada Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
    - b. Jumlah los maupun petak dengan jumlah pedagang tidak seimbang sehingga ada sebanyak 234 pedagang yang tidak tertampung di Pasar Mangkurawang, maka di buatnya petak sementara untuk menampung 234 yang berada di seberang Pasar Mangkurawang.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku agen pelaksana dalam komunikasi antar pedagang perlu dilakukan lebih intens bagi keseluruhan pedagang tanpa memandang pedagang besar atau kecil, agar para agen pelaksana dapat memahami apa yang menjadi kendala dan keluhan bagi pedagang yang terkena dampak negatif dalam proses relokasi
2. Perlunya persiapan dana yang lebih matang dan alternatif dana lain atau dari dana dari pihak ketiga karena relokasi pasar membutuhkan dana yang cukup besar, mengingat defisitnya anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga tidak menjadi beban bagi Dinas terkait.
3. Dalam hal ini perlu ditertibkannya pasar tumpah, pasar kaget dan pembangunan pasar di sekitar wilayah Pasar Tangga Arung serta membangun pasar penyangga disetiap kelurahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek kepadatan penduduk, lokasi dan infrastruktur serta pendukung lainnya sehingga Pasar Mangkurawang menjadi pasar induk dan penyalur untuk pasar penyangga serta pedagang keliling.
4. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlunya transparansi dalam penyajian informasi berkaitan dengan proses relokasi yang perlu di sampaikan kepada pedagang dan masyarakat sehingga meminimalisir kendala-kendala sosial yang timbul.
5. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah seringkali tidak memberikan ruang terhadap proses negoisasi atau membagi informasi untuk menemukan titik temu antar dua kepentingan yang berbeda sehingga dalam merumuskan kebijakan pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan sehingga adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah dan pedagang tanpa adanya disertai komunikasi timbal balik diantara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan, Komariah dan Djam'an Satori. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Indriati dan Arif Widiyatmoko. (2008). *Pasar Tradisional*. Semarang:Bengawan Ilmu.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia(UI-PRESS).

- Moleong, Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karja.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta:PT Gramedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Ridlo, Agung Muhammad. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang:Unissula Press.
- Winarno, Budi. (2011). *Teori dan Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- . (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### **Dokumen**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 Ayat 6
- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32/SK-BUP/HK/2017 Tentang Tim Pemandangan Pedagang Dari Pasar Tangga Arung Ke Pasar Mangkurawang Kecamatan Tenggarong.

### **Jurnal dan Artikel**

- Musthofa, Z. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Porgram Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Program Stusi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik:Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Sumber Internet**

- Humas Kukar (2013). “Bupati Kukar Resmikan Pasar Gerbang Raja Mangkurawang”.(online),(<https://www.kutaikartanegara.com/news.php/id=4212>, diakses 20 Maret 2018).